

WORKING PAPER PKSPL-IPB

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**
Center for Coastal and Marine Resources Studies
Bogor Agricultural University

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PADA PERENCANAAN SPASIAL DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIA

Oleh:

Luky Adrianto
Yus Ristandi
Galih Rakasiwi



**BOGOR
2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
1 LATAR BELAKANG	1
2 METODE STUDI	3
2.1 Pendekatan Implementasi Program.....	3
2.2 Tahapan Implementasi	3
2.2.1 Tahapan Inisiasi (<i>Initiation Stage</i>)	3
2.2.2 Tahapan Konsolidasi (<i>Consolidation Stage</i>).....	3
2.2.3 Tahapan Perencanaan Program Implementasi (<i>Implementation Program Planning Stage</i>).....	4
2.2.4 Tahap Implementasi (<i>Implementation Stage</i>).....	4
3 TAHAPAN AKTIVITAS	4
3.1 Konsolidasi Nasional (<i>National Consolidation</i>)	4
3.2 Penerjemahan Dokumen “ <i>Emerging Issues in the Coastal and Marine Spatial Planning</i> ” (<i>Translating the Resources Materials</i>)	6
3.3 Persiapan Training (<i>Preparation of Training</i>).....	6
3.4 Diskusi Terbatas Pembahasan Modul Training (Mini Workshop on Training Modules).....	7
4 IMPLEMENTASI PROYEK DAN PENCAPAIAN (<i>Project Implementation and Achievement</i>)	7
4.1 Konsolidasi Nasional (<i>National Consolidation</i>)	7
4.2 Penerjemahan buku referensi (<i>Resources Document</i>).....	7
4.3 Persiapan Training.....	8
5 HASIL, PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK TERBAIK (<i>Results, Lesson Learned and Best Practices</i>)	11
5.1 Hasil Training.....	11
5.2 Pengalaman Pembelajaran dan Praktik Terbaik.....	11
6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	12
6.1 Kesimpulan.....	12
6.2 Rekomendasi.....	12
REFERENSI.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Peraturan Penting Terkait Wilayah Pesisir, Sumber Daya Kelautan dan Manajemen Perikanan.....	2
Tabel 2.	Daftar lembaga dan mandatnya terkait dengan tata kelola perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan di Indonesia.	4
Tabel 3.	Lembaga Inti Perencanaan Spasial Wilayah Pesisir dan Lautan di Indonesia.....	6

PKSPL-IPB

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Evolusi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) di Indonesia 1
- Gambar 2.** Pendekatan Metode pada Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir di Indonesia 3
- Gambar 3.** Sampul Terjemahan Buku Referensi “*Emerging Issues in the Coastal and Marine Spatial Planning*” 8

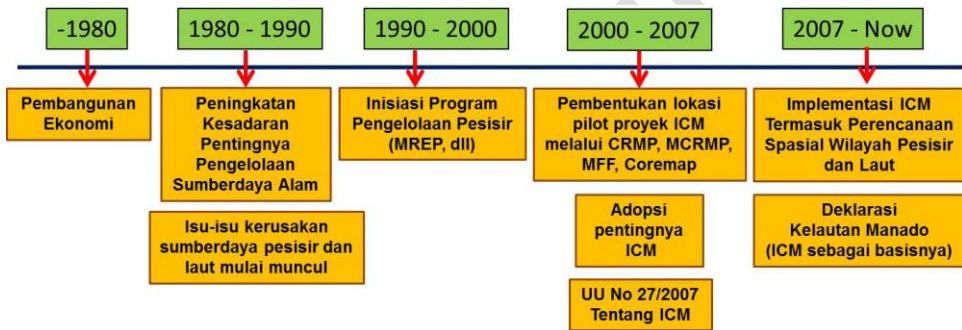
PKSPL-IPB

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PADA PERENCANAAN SPASIAL DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIA

Luky Adrianto¹, Yus Rustandi², dan Galih Rakasiwi³

1 LATAR BELAKANG

Pembahasan tentang Perencanaan Spasial di wilayah Pesisir dan Laut tak lepas dari evolusi Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM) di Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam **Gambar 1**, evolusi ICM dimulai dengan munculnya sumber masalah degradasi pesisir dan kelautan dan kesadaran pemerintah untuk menanggapi isu-isu. Puncak evolusi ICM Nasional dicapai pada tahun 2007 dengan pembentukan Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil. Dalam UU ini, kawasan pesisir dan perencanaan spasial wilayah pesisir dan laut menjadi kewenangan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan pesisir.



Gambar 1. Evolusi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICM) di Indonesia

Menurut Undang-Undang, perencanaan pengelolaan pesisir lokal terdiri dari 4 tingkat dokumen perencanaan, yaitu: (1) Rencana strategis pesisir; (2) Rencana zonasi pesisir, (3) Rencana pengelolaan pesisir, dan (4) Rencana aksi di wilayah pesisir.

¹Kepala PKSPL-IPB dan Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK-IPB

²Peneliti Bid. Sistem Informasi Geografis, PKSPL-IPB.

³Peneliti Bid. Sistem Informasi Geografis, PKSPL-IPB.

Secara praktis, konteks pengelolaan pesisir di Indonesia, sebenarnya telah banyak aturan hukum untuk mengelola sumber daya pesisir dan perikanan, dan dapat dianggap sudah relatif lengkap. Selama lima tahun terakhir, ada sepuluh peraturan penting dibentuk terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia seperti disajikan pada **Tabel 1** di bawah ini.

Tabel 1. Peraturan Penting Terkait Wilayah Pesisir, Sumber Daya Kelautan dan Manajemen Perikanan di Indonesia

No	Strategi, Kebijakan, dan Program	Dekripsi	Kaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan	Tingkat Relevansi
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2004-2025)	Penjelasan pada Undang-Undang No 25/2005 dengan mencantumkan misi pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar	Kebijakan dasar untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Tinggi
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah I (2004-2009)	Tercantum pada Peraturan Pemerintah	Kebijakan dasar untuk rencana pembangunan ekonomi selama 5 tahun	Tinggi
3	Perencanaan Tata Ruang	Penjelasan pada Undang-Undang No 26/2007	Dasar kebijakan tata ruang nasional termasuk ruang pesisir dan laut	Tinggi
4	Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Management	Penjelasan pada Undang-Undang No 27/2007	Manajemen dasar untuk Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil	Tinggi
5	Manajemen dan Kebijakan Perikanan	Penjelasan pada Undang-Undang No 45/2009	Kebijakan nasional mengenai pengelolaan perikanan	Tinggi
6	Kebijakan Lingkungan, Manajemen dan Pengendalian	Penjelasan pada Undang-Undang No 32/2009	Pengelolaan lingkungan sebagai aset nasional, termasuk pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (dan isu pemanasan global dan ekoregion)	Menengah
7	Kebijakan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota	Dijelaskan pada UU No 32/2004, dan UU No 33/2004	Pengembangan dan Manajemen Provinsi dan Kabupaten, termasuk antar provinsi dan kabupaten manajemen. Lebih dari 300 kabupaten dari 425 kabupaten di Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah pesisir.	Menengah
8	Keamanan Pesisir dan Laut	Dijelaskan pada fungsi BAKORKAMLA	Berfokus pada mekanisme integrasi dalam konteks keamanan laut termasuk penjaga pantai	Menengah
9	Konservasi Sumberdaya Pesisir dan Laut	Dijelaskan pada perihal PP No 60/2008 Tentang pengelolaan kawasan konservasi perikanan	Berfokus pada strategi konservasi habitat ikan	Tinggi
10	Pembangunan daerah tertinggal termasuk pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan	Dijelaskan pada SK Menteri No 001/KEP/M-PDT/I/2005	Fokus pada daerah tertinggal termasuk pulau-pulau terluar, dan daerah tertinggal lainnya	Menengah

2 METODE STUDI

2.1 Pendekatan Implementasi Program

Pendekatan metode yang dilakukan pada implementasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia ini dibangun berdasarkan semangat partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Laut. Secara skematis, pendekatan metode ini disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Pendekatan Metode pada Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir di Indonesia

2.2 Tahapan Implementasi

2.2.1 Tahapan Inisiasi (*Initiation Stage*)

Tahap ini berfokus pada inisiasi program yang melibatkan tiga pihak yaitu COBSEA sekretariat, COBSEA National Focal Point (NFP), dan PKSPL-IPB. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyepakati tujuan dan pendekatan implementasi.

2.2.2 Tahapan Konsolidasi (*Consolidation Stage*)

Tahap ini adalah penting karena kebutuhan pembagian peran dan mandat di antara para pemangku kepentingan nasional terkait dengan perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan. Pada tahap ini, PKSPL-IPB dan NFP bertanggung jawab untuk melakukan pertemuan dengan lembaga terkait dan mengundang lembaga tersebut terlibat pada program perencanaan spasial pesisir dan lautan tersebut.

2.2.3 Tahapan Perencanaan Program Implementasi (*Implementation Program Planning Stage*)

Pada tahap ini, PKSPL-IPB sebagai lembaga pelaksana implementasi melakukan tahapan implementasi terutama yang berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam memperkuat kapasitas sumberdaya manusia pemerintah dalam melakukan dan melaksanakan perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan.

2.2.4 Tahap Implementasi (*Implementation Stage*)

Pelaksanaan rencana program, meliputi pertemuan, pelatihan dan evaluasi yang mencakup semua stakeholder.

3 TAHAPAN AKTIVITAS

3.1 Konsolidasi Nasional (*National Consolidation*)

Konsolidasi nasional merupakan salah satu kegiatan penting dalam proyek ini karena kompleksitas masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan spasial pesisir dan lautan. Hal ini terkait dengan berbagai institusi yang memiliki fungsi dan mandat dalam konteks manajemen dan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Indonesia. **Tabel 2** menunjukkan daftar lembaga yang terkait dengan tata kelola perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan di Indonesia.

Tabel 2. Daftar lembaga dan mandatnya terkait dengan tata kelola perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan di Indonesia.

No	Institusi	Tugas Pokok/Mandat	Kaitan dengan Tata Kelola Pesisir dan Lautan
1	MENKO Perekonomian	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional	Insentif ekonomi untuk aktifitas perekonomian di wilayah pesisir
2	MENKO KESRA	Koordinasi Kebijakan Nasional kesejahteraan masyarakat termasuk pengentasan kemiskinan dan pendidikan	Kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat pesisir
3	MENKO POLHUKAM	Koordinasi Kebijakan Nasional terkait Politik Hukum dan Keamanan	Kebijakan keamanan di wilayah pesisir dan laut wilayah pesisir dan laut.
4	Kementerian Lingkungan	Koordinasi Kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan	Koordinasi program pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir dan laut wilayah pesisir dan laut.
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Kebijakan pembangunan sumberdaya perikanan dan kelautan dan konservasi sumberdaya perikanan kelautan
6	Kementerian Perhubungan	Pengelolaan system transportasi nasional	Pengelolaan pelabuhan dan transportasi laut
7	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur nasional	Infrastruktur di kawasan pesisir dan laut dan mitigasi
8	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan pemerintahan dalam negeri	Penyelenggara pemerintahan daerah secara administratif hingga tingkat provinsi

No	Institusi	Tugas Pokok/Mandat	Kaitan dengan Tata Kelola Pesisir dan Lautan
9	Kementerian Pariwisata	Promosi pariwisata nasional dan objek serta pembangunan industry pariwisata	Standarisasi fasilitas dan layanan terkait aktivitas wisata di pesisir dan laut
10	Kementerian ESDM	Mengelola dan mengamankan pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan nasional	Kegiatan penambangan pesisir pantai dan lepas pantai
11	Kementerian Kehutanan	Mengelola sumber daya hutan untuk kesejahteraan nasional	Manajemen Sungai – pesisir, konservasi hutan
12	Kementerian Pertanian	Mengelola dan mengamankan pasokan pangan khususnya yang terkait dengan pengelolaan pertanian dan peternakan	Pertanian pesisir, ketahanan pangan
13	Kementerian Industri	Mengelola pembangunan industri	Pemantauan dan monitoring polusi industri pesisir
14	Kementerian Luar Negeri	Koordinator urusan hubungan luar negeri	Isu lintas batas, sengketa laut Internasional, batas pantai, pulau terluar
15	BAPPENAS	Perencanaan dan koordinasi pembangunan ekonomi nasional	Perencanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan laut
16	DISHIDROS TNI AL	Strategi keamanan pembangunan nasional menggunakan kekuatan laut	Pesisir dan Laut Pertahanan
17	BAKORKAMLA	Koordinasi keamanan nasional	Keamanan Pesisir dan Laut
18	LIPI, Perguruan Tinggi dan Lembaga Reset lainnya.	Koordinasi penelitian pada sumber daya pesisir dan laut	Penelitian dan pengembangan pesisir dan kelautan
19	SKK MIGAS	Mengelola bisnis migas melalui KKSK mekanisme	Kegiatan minyak dan gas di lepas pantai, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas
20	BKPM	Koordinasi dan membuat peraturan tentang promosi investasi (penanaman modal asing dan domestik)	Promosi investasi yang berkaitan dengan pesisir dan pemanfaatan sumber daya laut.
21	BPS	Mengumpulkan, diseminasi statistik nasional	Penyediaan statistik yang terkait dengan pengembangan sumber daya pesisir dan kelautan
22	Badan Informasi Geospasial (BAKOSURTANAL)	Mengembangkan, penyediaan data dan informasi spasial	Mengembangkan, penyediaan data dan informasi spasial

Sumber : *Adrianto, et.al (2007)*

Mengenai perlunya konsolidasi dalam hal program peningkatan kapasitas, kami mengidentifikasi dengan menyebutnya sebagai Lembaga Inti Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu, yang lebih kurang memiliki peran dan tugas langsung lebih banyak mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perencanaan spasial pesisir dan lautan tersebut. Lembaga-lembaga inti ini berperan sebagai pemain utama dalam program perencanaan spasial pesisir dan lautan di Indonesia. **Tabel 3** menunjukkan daftar Lembaga Inti perencanaan spasial pesisir dan lautan.

Tabel 3. Lembaga Inti Perencanaan Spasial Wilayah Pesisir dan Lautan di Indonesia

No	Institusi	Mandat Utama	Keterkaitan dengan Perencanaan Spasial
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinasi dan Pengelolaan Nasional Perikanan dan Wilayah Pesisir	Memfasilitasi proses penyusunan Rencana Tata Ruang untuk wilayah pesisir di tingkat Provinsi dan Kabupaten.
2	Kementerian Lingkungan	Koordinasi Kebijakan Nasional pada Pengelolaan Lingkungan di wilayah Pesisir dan Lautan	Koordinator Mekanisme dan proses penanganan isu-isu lingkungan terkini di wilayah pesisir dan laut, memfasilitasi penyusunan Strategi Pengelolaan Lingkungan untuk perencanaan spasial.
3	Kementerian Pekerjaan Umum (PU)	Koordinasi Kebijakan Nasional pada bidang infrastruktur dan perencanaan spasial	Koordinator penyusunan Tata Ruang baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
4	Bappenas	Koordinasi Rencana Pembangunan Nasional	Integrasi perencanaan pembangunan lintas sektoral dan tingkat regional.
5	Kementerian Dalam Negeri	Koordinasi Kebijakan Nasional pada tingkat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Memfasilitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang
6	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Koordinasi kebijakan pengelolaan pertanahan	Memfasilitasi status kepemilikan lahan pada wilayah perencanaan Tata Ruang.

3.2 Penerjemahan Dokumen “*Emerging Issues in the Coastal and Marine Spatial Planning*” (*Translating the Resources Materials*)

Salah satu “sumber dokumen” yang penting dalam konteks program perencanaan spasial pesisir dan lautan adalah dokumen "Isu-isu Terkini dalam Rencana Spasial Wilayah Pesisir dan Laut" yang dikembangkan oleh COBSEA dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara asal (yaitu Bahasa Indonesia). Bahan ini akan digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam Pelatihan perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan.

3.3 Persiapan Training (*Preparation of Training*)

Menurut tahapan program COBSEA pada perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan tersebut, Phase-3 dari Proyek difokuskan pada pengembangan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pemahaman dan pengembangan perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan. Dalam hal ini, pelatihan perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan adalah kegiatan inti dalam program. Dalam rangka untuk melaksanakan pelatihan, maka dengan demikian tahap persiapan pelatihan diperlukan.

3.4 Diskusi Terbatas Pembahasan Modul Training (Mini Workshop on Training Modules)

Kegiatan ini adalah penting dalam hal berbagi dan menyetujui tujuan, pendekatan, teknik dan modul yang akan digunakan dalam pelatihan. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelatih dan organizer pelatihan yang dipimpin oleh, Dr Luky Adrianto dari PKSPL-IPB.

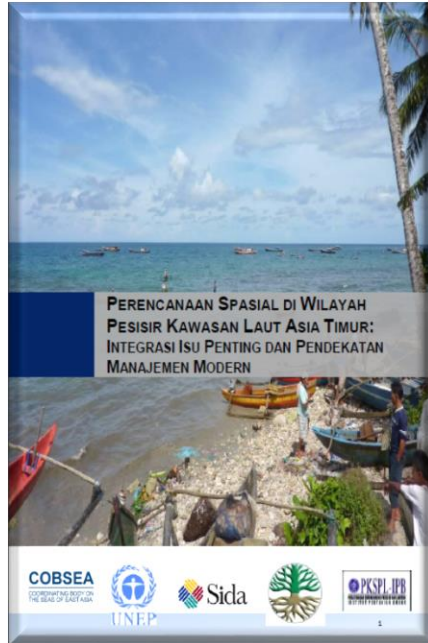
4 IMPLEMENTASI PROYEK DAN PENCAPAIAN (*Project Implementation and Achievement*)

4.1 Konsolidasi Nasional (*National Consolidation*)

Konsolidasi Nasional dalam rangka untuk koordinasi dan menyetujui tujuan program pembangunan kapasitas pada perencanaan spasial di wilayah pesisir dan lautan.

4.2 Penerjemahan buku referensi (*Resources Document*)

Menerjemahkan “Dokumen Sumber/Referensi” juga kegiatan yang sangat penting dilakukan selama proyek. Dokumen referensi telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan penambahan konten asli, kami juga telah menempatkan referensi lain terutama Metodologi perencanaan tata ruang umum dan perencanaan tata ruang pesisir dan laut dalam konteks Indonesia yang telah dikembangkan oleh lembaga yang terkait dengan penataan ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan). **Gambar 3** menunjukkan sampul bahan referensi yang diterjemahkan.



Gambar 3. Sampul Terjemahan Buku Referensi “*Emerging Issues in the Coastal and Marine Spatial Planning*”

4.3 Persiapan Training

Persiapan pelatihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang ada di PKSPL -IPB melalui Unit Pelatihan . Seperti tertulis dalam SOP Unit Pelatihan , persiapan Pelatihan termasuk sejumlah kegiatan meliputi: (1) Undangan untuk Calon Peserta, (2) Undangan untuk Pelatih, (3) adanya kerjasama dengan penyedia tempat dan Fasilitas Akomodasi, (4) penataan Bahan Pelatihan, (5) Penyusunan Jadwal Pelatihan, (6) Penataan Evaluasi Pelatihan.

Tujuan dari pelatihan Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan ini dirancang sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar dan pendekatan perencanaan tata ruang pesisir dan laut di antara pejabat pemerintah, (2) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mengintegrasikan isu-isu yang muncul dan pendekatan manajemen dalam Penataan Ruang Pesisir dan Laut , seperti: manajemen berbasis ekosistem, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan manajemen berbasis hasil antara pejabat pemerintah, (3) Untuk meningkatkan pemahaman dalam pendekatan baru dalam proses perencanaan (Penataan Ruang Pesisir dan Kelautan) antara pejabat pemerintah , (4) Untuk meningkatkan kesadaran pejabat pemerintah tentang koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang berbeda.

Berdasarkan Lokakarya Mini yang dilakukan di antara para pelatih dan dipimpin oleh Kepala Pelatihan, isi pelatihan tersebut dirancang sebagai berikut:

(1) Pengenalan Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan
(*Introduction to CMSP*)

a. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Berbasis Ekosistem:

- Definisi Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem
- Bagaimana Pengelolaan Pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem melakukan perbaikan pada manajemen saat ini?
- Mengenal hubungan di dalam dan lintas ekosistem
- Menerapkan perspektif jasa ekosistem
- Memahami dan menangani dampak kumulatif
- Mengelola untuk beberapa tujuan
- Merangkul perubahan, belajar, dan beradaptasi

b. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*):

- Definisi zona pesisir
- Batas wilayah pesisir
- Wilayah pesisir di Indonesia
- Tipe ekologis tropis wilayah pesisir di Indonesia
- Tipe masyarakat pesisir di Indonesia
- Interkoneksi antara darat, pesisir dan lautan
- Peran multi stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir
- Pendekatan baru: Pengelolaan terpadu Sungai Pesisir dan Lautan (*Integrated River Coastal and Ocean Management (IRCOM)*)
- Pengelolaan pulau pulau kecil tropis

c. Isu-Isu terkini pada lingkungan Wilayah Pesisir dan Lautan: Pengendalian Pencemaran, Degradasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim (*Pollution Controls, Degradation, Mitigation, Climate Change*)

- Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction (DRR)*)
- Mengetahui kondisi pantai dengan lebih baik melalui perspektif DRR
- Memperkenalkan DRR dan keterkaitan untuk Adaptasi Perubahan Iklim
- Menilai Risiko Pesisir dari Bencana Alam
- Langkah-langkah untuk DRR di wilayah pesisir

- Mengintegrasikan DRR di Program Pengelolaan Pesisir; Menghubungkan Kebijakan dengan implementasi
- Perubahan Iklim
- Definisi Perubahan Iklim
- Potensi ancaman yang berasal dari Perubahan Iklim
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Adaptasi dalam ekosistem pesisir dan masyarakat terhadap dampak Perubahan Iklim
- Pengarusutamaan DRR dan Perubahan Iklim dalam perencanaan pesisir dan manajemen Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan

(2) Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan (*Coastal and Marine Spatial Planning (CMSP)*)

a. Persiapan Perencanaan Spasial

- Identifikasi kebutuhan
- Identifikasi kebutuhan keuangan dan sumber keuangan
- Menyelenggarakan proses
- Mengorganisir stakeholder
- Manajemen Resolusi Konflik
- Penataan Kelembagaan dan Koordinasi
- Pengaturan Keuangan

b. Analisis Perencanaan Spasial

- Mendefinisikan kondisi saat ini yang ada: kondisi ekologi dan sosial pesisir dan laut
- Profil Ekologis
- Profil Sosial
- Mendefinisikan kondisi yang ditargetkan masa depan
- Manajemen berbasis Hasil

c. Adopsi Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan (*Adoption of the CMSP*)

- Mempersiapkan perencanaan penataan ruang pesisir dan laut
- Mengadopsi perencanaan tata ruang
- Cara mengatur dokumen Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan
- Pemantauan dan evaluasi

(3) Kerja Kelompok/ Kunjungan Lapang (*Task Group/Field Trip*)

- a. Perjalanan ke Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi
- b. Kondisi wilayah pesisir tropis

- c. Pariwisata
- d. Pengelolaan kawasan pesisir
- e. Program rehabilitasi pantai
- f. Masyarakat pesisir
- g. Penangkapan ikan dan budidaya laut
- h. Polusi di kawasan Pesisir
- i. Kerja kelompok dan diskusi: menyiapkan dokumen Perencanaan Spasial di Wilayah Pesisir dan Lautan untuk daerah pesisir.

5 HASIL, PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK TERBAIK (Results, Lesson Learned and Best Practices)

5.1 Hasil Training

Hasil pelatihan sesungguhnya adalah pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana merancang perencanaan spasial pesisir dan laut. Beberapa poin hasil yang dapat dilaporkan seperti yang tercantum sebagai berikut:

- Para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dalam prinsip-prinsip dasar dan pendekatan perencanaan spasial pesisir dan laut.
- Para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengintegrasikan isu-isu yang muncul dan pendekatan manajemen ke proses perencanaan spasial Pesisir dan Laut, seperti: manajemen berbasis ekosistem, pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem, adaptasi perubahan iklim dan manajemen berbasis hasil.
- Para peserta belajar dan memahami konsep pendekatan baru dalam proses perencanaan (Perencanaan Spasial Pesisir dan Laut).
- Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga pemerintah dalam melaksanakan Perencanaan Spasial Pesisir dan Laut di Indonesia

5.2 Pengalaman Pembelajaran dan Praktik Terbaik

Sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang dilakukan setelah pelatihan, ada beberapa poin penting pembelajaran seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- Perpanjangan durasi pelatihan. Peserta pelatihan menyarankan untuk memperpanjang durasi pelatihan ke sekitar 14 hari. Harapan untuk memperpanjang durasi pelatihan ini sejalan dengan harapan untuk memperdalam kurikulum pelatihan-kursus.

- Untuk melanjutkan pelatihan dengan tahap kedua dari perencanaan spasial pelatihan pesisir dan kelautan. Para peserta diajak untuk tahap kedua dari pelatihan adalah mereka yang telah berpartisipasi dalam pesisir nasional Indonesia dan perencanaan spasial pesisir dan laut di 2012.
- Pengetahuan lebih rinci pada proses perencanaan spasial yang dibutuhkan untuk pelatihan tahap kedua
- Praktek nyata menyiapkan dokumen proses perencanaan tata ruang.

6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan proyek secara keseluruhan kita bisa mengidentifikasi beberapa kesimpulan penting yang disajikan sebagai berikut:

- Perencanaan tata ruang pesisir dan laut adalah alat yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan kelautan penggunaan dan manajemen di Indonesia.
- Perencanaan tata ruang pesisir dan laut di Indonesia masih mechnism sangat kompleks karena tumpang tindih kewenangan terkait dengan proses perencanaan. Namun, kompleksitas ini telah dalam proses untuk dikelola dan diatur melalui Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN).
- Program peningkatan kapasitas dalam konteks perencanaan tata ruang pesisir dan laut sangat penting untuk dilakukan secara rutin yang melibatkan lembaga-lembaga inti yang berkaitan dengan proses perencanaan tata ruang di Indonesia

6.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

- Pelatihan lanjut tentang perencanaan spasial wilayah pesisir dan laut terutama dalam konteks proses teknis perencanaan tata ruang harus dilakukan dengan peserta yang sama untuk memperkuat kapasitas mereka dalam urutan skills perencanaan tata ruang.
- Forum perencanaan spasial wilayah pesisir dan laut dalam membahas semua proses dan mekanisme dalam mengembangkan perencanaan spasial harus

dimulai dengan melibatkan semua instansi terkait dalam konteks perencanaan spasial wilayah pesisir dan laut. Forum ini dapat berupa forum baru dengan nama Forum Nasional Lembaga Utama Pengelolaan Pesisir dan Laut terpadu. Forum ini difasilitasi oleh PKSPL-IPB.

PKSPL-IPB

REFERENSI

Bibby C, Martin J, Stuart M. 2000. Teknik-teknik Lapangan Survei Burung. Bogor: Birdlife International Indonesia Programme.